



SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Nomor: 025/SPPM/WK/SCM/WAB/2024

Tanggal: 10 Januari 2024

No Reference PO : 4100052137

Antara

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

Building Division

Dan

PT. VICTORINDO INTI CEMERLANG

Untuk

Pengadaan PLC, SCADA POWER dan PANEL MV

PROYEK DESIGN & BUILD PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

SEKRETARIAT PRESIDEN DAN BANGUNAN PENDUKUNG PADA

KAWASAN ISTANA KEPRESIDENAN DI IBUKOTA NEGARA

(1122037)

SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Antara

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Building Division

Dan

PT. VICTORINDO INTI CEMERLANG

Untuk Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV

Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. A. Nama : Rini Sekaraji**
Jabatan : Senior Vice President Supply Chain Management Division
- B. Nama : Paulus Budi Kartiko**
Jabatan : Pj Senior Vice President Building Division

Secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam , S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, berkedudukan di Gedung Waskita Heritage, Jalan MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

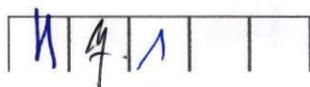
- 2. Nama : Victor Sunik**
Jabatan : Direktur

Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Victorindo Inti Cemerlang, suatu perseroan yang sesuai dengan akta perubahan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 09 Oktober 2023 di buat di hadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0061001.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Victorindo Inti Cemerlang, berkedudukan Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1 No. 5 Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta Raya 14470 DKI Jakarta disebut "**Pihak Kedua**".

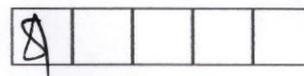
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat untuk Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV untuk keperluan **Pihak Pertama**, yang akan dipergunakan pada Proyek **Pembangunan**

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara dan menyetujui untuk menandatangani bersama, berdasarkan:

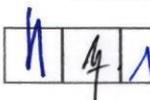
1. Surat Penawaran Pihak Kedua nomor : VQ-12230306 tanggal 27 Desember 2023.
 2. Klarifikasi dan Negosiasi Final Harga Pengadaan tanggal 29 Desember 2023.
 3. Pengumuman Pemenang Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV Nomor : 000089/WK/WeProc/PNM/000398-WAB-2023 tanggal 30 Desember 2023.
 4. Penetapan Pemenang Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV Nomor : 000089/WK/WeProc/PTP/000398-WAB-2023 tanggal 8 Januari 2024.
- dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 **Perjanjian**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.2 **Perjanjian Utama**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan Pemilik Proyek berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini.
- 1.3 **Pengguna Jasa**, berarti **Pejabat Pembuat Komitmen Bina Penataan Bangunan I Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur** yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik **Proyek**.
- 1.4 **Pekerjaan**, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV, peralatan perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan **Pihak Kedua**.
- 1.5 **Harga Pekerjaan**, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara **Pekerjaan** yang akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 1.6 **Pekerjaan tambah/kurang**, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari **Pekerjaan**, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan **Pekerjaan**, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaan **Pihak Kedua** yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini dan dinyatakan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- 1.7 **Berita Acara Penerimaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV (BAPM)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** yang memuat keterangan bahwa PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dikirim oleh **Pihak Kedua** telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 1.8 **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang memuat perhitungan pengiriman yang telah dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dengan merujuk kepada Persyaratan Teknis.
- 1.9 **Berita Acara Pembayaran (BAP)**, adalah berita acara yang dikeluarkan **Pihak Pertama** yang menyatakan pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dilakukan **Pihak Kedua** telah dapat dilakukan pembayaran karena telah memenuhi Persyaratan Teknis dan syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya.
- 1.10 **Konsultan Pengawas**, berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Utama** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini.
- 1.11 **Serah Terima Pertama**, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dilaksanakan **Pihak Kedua** telah selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Persyaratan Teknis dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 1.12 **Masa Pemeliharaan**, berarti suatu jangka waktu dimana **Pihak Kedua** diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil **Pekerjaan** sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil **Pekerjaan**.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

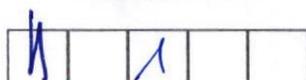
Pihak Pertama bersedia membeli dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** bersedia menjual dengan baik PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dokumen Kontrak Utama, sesuai contoh material yang telah disetujui **Pihak Pertama** dan akan dipergunakan untuk pekerjaan **Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara** dengan perincian kualitas dan prakiraan volume dan harga satuan yang tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini

**PASAL 3
JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI**

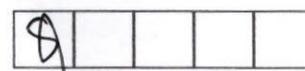
- Jenis dan kualitas material serta prakiraan volume yang harus diadakan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cubicle 01 - Metering GU	1 unit	90,356,000	90,356,000
2.	Cubicle 02 - Aresster	1 unit	70,032,000	70,032,000
3.	Cubicle 03 - Incoming F1A	1 unit	268,350,000	268,350,000
4.	Cubicle 04 - Incoming GA	1 unit	262,315,000	262,315,000
5.	Cubicle 05 - Outgoing GUT5	1 unit	230,005,000	230,005,000
6.	Cubicle 06 - Outgoing GUT4	1 unit	262,315,000	262,315,000
7.	Cubicle 07 - Outgoing GUT3	1 unit	262,315,000	262,315,000
8.	Cubicle 08 - Bustie GU	1 unit	268,598,000	268,598,000
9.	Cubicle 09 - Incoming GB	1 unit	267,657,000	267,657,000
10.	Cubicle 10 - Outgoing GUT2	1 unit	230,005,000	230,005,000
11.	Cubicle 11 - Outgoing GUT1	1 unit	230,005,000	230,005,000
12.	Cubicle 12 - Kubikal GUG1	1 unit	230,005,000	230,005,000
13.	Cubicle 13 - Kubikal GUG3	1 unit	230,005,000	230,005,000
14.	Cubicle 14 - Incoming F1B	1 unit	264,399,000	264,399,000
15.	Accessories MVMDP SWB GARDU UTAMA	1 unit	8,802,000	8,802,000
16.	Cubicle 15 - Metering	1 unit	106,794,000	106,794,000
17.	Cubicle 16 - Aresster	1 unit	91,812,000	91,812,000

Paraf Pihak Pertama

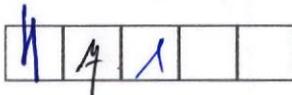


Paraf Pihak Kedua

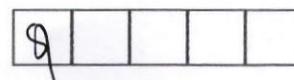


No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
18.	Cubicle 17 - Kubikal G1GU	1 unit	289,751,000	289,751,000
19.	Cubicle 18 - Incoming G1T2	1 unit	290,444,000	290,444,000
20.	Cubicle 19 - Bustie G1	1 unit	341,359,000	341,359,000
21.	Cubicle 20 - Outgoing G1T1	1 unit	240,706,000	240,706,000
22.	Cubicle 21 - Outgoing G1T6	1 unit	240,706,000	240,706,000
23.	Cubicle 22 - Kubikal G1G3	1 unit	291,835,000	291,835,000
24.	Accessories SWB GARDU G1	1 unit	8,802,000	8,802,000
25.	Cubicle 23 - Metering	1 unit	176,188,000	176,188,000
26.	Cubicle 24 - Aresster	1 unit	70,032,000	70,032,000
27.	Cubicle 25 - Incoming F2.2	1 unit	263,008,000	263,008,000
28.	Cubicle 26 - Outgoing G3S1	1 unit	262,315,000	262,315,000
29.	Cubicle 27 - Kubikal G3G1	1 unit	267,657,000	267,657,000
30.	Cubicle 28 - Kubikal G3GA	1 unit	262,315,000	262,315,000
31.	Cubicle 29 - Outgoing G3KP	1 unit	230,005,000	230,005,000
32.	Cubicle 30 - Bustie G3	1 unit	314,309,000	314,309,000
33.	Cubicle 31 - Kubikal G3GU	1 unit	267,657,000	267,657,000
34.	Cubicle 32 - Outgoing G3IN	1 unit	262,315,000	262,315,000
35.	Cubicle 33 - Incoming G3GB	1 unit	262,315,000	262,315,000
36.	Cubicle 34 - Outgoing G3S2	1 unit	230,005,000	230,005,000
37.	Cubicle 35 - Incoming F2.1	1 unit	264,399,000	264,399,000
38.	Accessories SWB GARDU G2	1 unit	8,802,000	8,802,000
39.	Cubicle 44 - Kubikal GA	1 unit	251,965,000	251,965,000
40.	Cubicle 45 - Kubikal G1	1 unit	256,514,000	256,514,000
41.	Cubicle 46 - Kubikal G2	1 unit	251,171,000	251,171,000
42.	Cubicle 47 - Kubikal ZZ	1 unit	251,171,000	251,171,000
43.	Cubicle 48 - Kubikal G3	1 unit	251,171,000	251,171,000

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
44.	Cubicle 49 - Kubikal G4	1 unit	251,171,000	251,171,000
45.	Cubicle 50 - Kubikal GB	1 unit	251,171,000	251,171,000
46.	Accessories SWB GARDU G2	1 unit	8,802,000	8,802,000
47.	Cubicle 36 - Kubikal UA	1 unit	284,831,000	284,831,000
48.	Cubicle 37 - Kubikal UB	1 unit	240,336,000	240,336,000
49.	Cubicle 38 - Kubikal UC	1 unit	234,994,000	234,994,000
50.	Accessories	2 Ls	8,802,000	17,604,000
51.	Cubicle 39 - Kubikal UD	1 unit	286,122,000	286,122,000
52.	Cubicle 40 - Kubikal UE	1 unit	284,831,000	284,831,000
53.	Cubicle 41 - Kubikal UF	1 unit	240,336,000	240,336,000
54.	Cubicle 42 - Kubikal UG	1 unit	234,994,000	234,994,000
55.	Cubicle 43 - Kubikal UH	1 unit	286,122,000	286,122,000
56.	PLC System GU	1 lot	2,405,158,000	2,405,158,000
57.	Panel & Accessories GU	1 lot	299,500,000	299,500,000
58.	Workstation GU	1 lot	1,806,722,000	1,806,722,000
59.	PLC System G1	1 lot	1,139,329,000	1,139,329,000
60.	Panel & Accessories G1	1 lot	951,372,000	951,372,000
61.	PLC System G3	1 lot	1,416,816,000	1,416,816,000
62.	Panel & Accessories G3	1 lot	951,372,000	951,372,000
63.	IOT Broker Configuration	1 lot	5,999,000	5,999,000
64.	Envision IOT Adjustmaent	1 lot	37,846,000	37,846,000
65.	Envision Desk adjustment	1 lot	28,135,000	28,135,000
66.	Recommendation system	1 lot	35,347,000	35,347,000
67.	SMART INDIVIDUAL CONTROL UNIT	6 lot	394,748,000	2,368,488,000
68.	POWER SYNC GARDU UTAMA	1 lot	1,878,930,000	1,878,930,000
69.	POWER SYNC GARDU G1	1 lot	586,462,000	586,462,000

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
70.	POWER SYNC GARDU G3	1 lot	1,171,523,000	1,171,523,000
SUB TOTAL				27.185.000.000
PPN (11%)				2.990.350.000
TOTAL				30.175.350.000

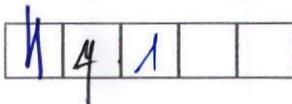
Terbilang : "Tiga Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah"

- Harga satuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat Fixed Unit Price, harga Franco Site Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Pihak Pertama sampai dengan volume kebutuhan terpenuhi seluruhnya.
- Jenis dan kualitas material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**.
- Harga satuan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** sudah termasuk didalamnya biaya, pengetesan dan pajak-pajak yang berlaku.
- Nilai Jual Beli tersebut di atas bersifat prakiraan. Nilai Jual Beli yang sebenarnya adalah realisasi pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, sesuai dengan permintaan dan yang diterima oleh **Pihak Pertama** sesuai harga satuan yang tersebut dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.

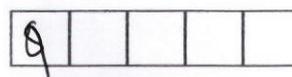
**PASAL 4
SPESIFIKASI DAN KUALITAS**

- Pihak Kedua** wajib dan dianggap sudah mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam **Perjanjian Utama** (Spesifikasi Teknis), termasuk ketentuan tentang masa pemeliharaan khususnya yang berkaitan dengan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**. **Pihak Pertama** (apabila diminta **Pihak Kedua**) akan memberi kepada **Pihak Kedua** copy dari Spesifikasi Teknis PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV atas biaya **Pihak Kedua**.
- PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 **Perjanjian** ini harus dalam keadaan baru, memenuhi standar mutu/spesifikasi teknis yang dapat diterima **Pihak Pertama** dan **Konsultan Pengawas**.
- Untuk menjamin kesesuaian kualitas **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, maka sebelum **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dikirim ke lapangan, **Pihak Kedua** diwajibkan untuk melaksanakan test sebagaimana dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis atas beban biaya **Pihak Kedua**.
- Penanganan mutu secara kontinyu dimulai pada saat proses produksi sampai dengan pengiriman.
- PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan diafkir/ditolak dan **Pihak Kedua** wajib mengganti material tersebut atas biaya **Pihak Kedua** dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
- Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mutu material PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV, apabila terjadi ketidaksesuaian mutu, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- Pihak Kedua** wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di bawah paling lambat pada saat penagihan terakhir:
 - Buku Petunjuk Penggunaan dan Perawatan Peralatan.
 - Buku Petunjuk Penggunaan dan Perawatan Sistem Kendali,
 - Sertifikat of Originality dari Pabrikan,
 - Berita Acara Test Com,
 - Surat Jaminan Purna Jual

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 5

JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL

1. Pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau mengikuti jadwal induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya **Perjanjian** ini sampai dengan tanggal **21 Oktober 2024** dan pada tanggal tersebut seluruh **Material** harus sudah diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dan disetujui oleh **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa**.
2. Pengiriman **Material** onsite Proyek Mei 2024.
3. **Pihak Kedua** harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan **Material** sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan sampai dengan kebutuhan dilapangan terpenuhi seluruhnya.

PASAL 6

SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

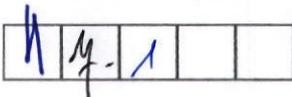
1. Pembayaran Uang Muka 15% (lima belas persen) dari Nilai Jual Beli dibayarkan oleh **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan jaminan uang muka berupa Bank Garansi Uang Muka kepada **Pihak Pertama** yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang di setujui oleh **Pihak Pertama** yang mana berlaku Bank Garansi tersebut wajib diperbaharui oleh **Pihak Kedua** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Bilamana **Pihak Kedua** lalai menerbitkan / memperbarui Bank Garansi tersebut maka **Pihak Pertama** akan menunda pembayaran (hak **Pihak Kedua**) sampai dengan diperbaharunya Bank Garansi tersebut.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress, Uang Muka 15% (lima belas persen), sebelum pengiriman (dengan melampirkan BA Hasil Uji) 50% (lima puluh persen), Material Onsite MOS 50% (lima puluh lima persen), dengan melampirkan **Berita Acara penerimaan Material (BAPM), Berita Acara Pembayaran (BAP)** dipotong uang muka proposional sesuai progress yang diterbitkan.
3. Setiap tahapan pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan sistem dengan skema Reguler sesuai dengan Prosedur Keuangan Pihak Pertama.
4. Pembayaran reguler 45 hari.
5. Kuitansi diterima **Pihak Pertama** dengan dilengkapi lampiran-lampirannya secara lengkap dan benar sesuai ketentuan akuntansi, sebagai berikut:
 - a. Asli Kwitansi
 - b. Copy Faktur Pajak
 - c. Berita Acara Penerimaan Material (BAPM) dan Dokumentasi
 - d. Berita Acara Pembayaran
 - e. Surat jalan asli;
 - f. Surat Penyaluran Rekening Pembayaran;
 - g. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada);
 - h. E-Nofa;
 - i. KTP Direksi;
 - j. NPWP dan SPPKP perusahaan;
 - k. NIB;
 - l. Dokumentasi material dan dokumentasi pengiriman material
6. **Pihak Pertama** berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh **Pihak Kedua**, apabila:
 - 6.1. Kualitas atau kuantitas Material yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui **Pihak Pertama** dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;
 - 6.2. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** sebagai akibat kelalaian/ kegagalan **Pihak Kedua**, atau;
 - 6.3. Timbul perselisihan antara **Para Pihak** atau **Pihak Pertama** dengan **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa**, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.

PASAL 7

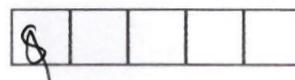
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
JAMINAN PENGADAAN MATERIAL

1. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut Surat **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Jaminan Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank atau Asuransi yang disetujui **Pihak Pertama** sebesar 5% dari nilai jual beli.
2. Jaminan Pengadaan tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dikembalikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah pengiriman **Material** ke lapangan terpenuhi seluruhnya yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila:
 - 3.1. **Pihak Kedua** menarik/mengundurkan diri atau tidak sanggup dan menyerahkan sebagian atau seluruh pengiriman Material kepada pihak lain, atau;
 - 3.2. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan pengiriman **Material**, atau;
 - 3.3. **Pihak Kedua** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini tetap tidak melaksanakan pengiriman, atau;
 - 3.4. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - 3.5. Terjadi pemutusan **Perjanjian** antara **Para Pihak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 **Perjanjian** ini.

PASAL 9
KLAIM KENAIKAN HARGA

Pada dasarnya **Pihak Kedua** tidak dibenarkan menuntut/klaim biaya tambahan kenaikan harga, sampai dengan kebutuhan dilapangan sesuai **Perjanjian** ini terpenuhi seluruhnya.

PASAL 10
PEMERIKSAAN MUTU

1. Inspeksi **Material** akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** bersama **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** atas dasar spesifikasi tersebut di atas. Pemeriksaan **Material** tersebut akan dilakukan sebelum **Material** dikirim dan harus disaksikan oleh **Para Pihak**.
2. Dalam hal khusus atas permintaan **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** menghendaki pemeriksaan ditempat lain atau instansi yang ditunjuk, **Pihak Kedua** wajib memenuhi persyaratan tersebut dengan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 11
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila terjadi penyimpangan kualitas/mutu dari yang disyaratkan dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini yang menyebabkan pekerjaan dibongkar akibat dari **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang dikirim, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang dibongkar tersebut dan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan mutu tersebut menjadi beban **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut sebagian atau keseluruhan sebagaimana syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini maupun jadwal yang telah ditentukan dan bilamana **Pihak Pertama** dengan terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya yang mungkin timbul menjadi beban **Pihak Kedua**, dengan pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila **Pihak Pertama** pada suatu waktu berkeyakinan bahwa **Pihak Kedua** karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan **Pihak Pertama** karena kurang/tidak mampu bekerja atau gagal melaksanakan tugasnya atau berbuat/melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan **Pihak Pertama** atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak, **Pihak Kedua** belum juga memulai kegiatannya, didahului peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, maka **Pihak Pertama** secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan/membatalkan **Perjanjian** ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.

Paraf Pihak Pertama

				
---	---	---	--	--

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap keadaan memaksa/force majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **Pihak Kedua** maupun **Pihak Pertama** seperti bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara umum, pemogokan yang bersifat memaksa dan berakibat langsung terhadap pengadaan Material dan jangka waktu pengadaan, yang disetujui secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, **Pihak Pertama** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam jangka waktu 7 x 24 jam, sejak pemberitahuan tersebut diterima atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pada dasarnya **Pihak Pertama** hanya mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV atas terjadinya keadaan memaksa/force majeure.

PASAL 13

RISIKO

1. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **Pihak Kedua**, maka segala resiko akibat kemacetan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** selama melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dalam pelaksanaan atau pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV ini), maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh **Konsultan MK** atau **Pengguna Jasa**, maka selambat-lambatnya 1 x24jam, **Pihak Kedua** harus dengan segera mengeluarkan dari lapangan dan mengganti kembali sejumlah yang ditolak dengan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 14

PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

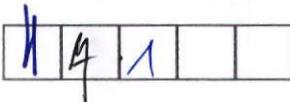
1. Apabila selama jangka waktu pengadaan terjadi perubahan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tambah atau kurang, apabila pekerjaan tambah tersebut melebihi dari Nilai Jual Beli maka akan dituangkan kedalam Addendum Perjanjian dengan mengacu harga satuan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang dianggap sah setelah mendapat perintah dan persetujuan **Pihak Pertama** secara tertulis.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dilakukan atas dasar harga yang tercantum pada Pasal 3 **Perjanjian** ini, namun apabila harga satuan dimaksud tidak ditentukan daftar harga satuan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dalam **Perjanjian** ini, maka harga satuan akan ditentukan kemudian.
4. Adanya pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah jangka waktu pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 15

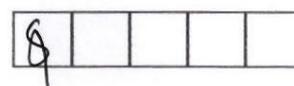
PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Perjanjian ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran **Perjanjian** ini.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan atau timbul karena **Perjanjian** ini baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir, dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dalam waktu **14 (empat belas) hari** tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** tidak akan menggugat ke pengadilan (termasuk pengadilan niaga) kepada **Pihak Pertama, Para Pihak** akan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT. 4 RW. 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 dan bukan melalui pengadilan/pengadilan niaga.
3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.
4. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka **Pihak Kedua** tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** yang mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama** sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-19/MBU/2013 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.
2. **Pihak Pertama** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, apabila :
 - 2.1. **Pihak Kedua** telah memindah-tangankan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** kepada pihak ketiga, atau;
 - 2.2. Terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhinya dan atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak **Perjanjian** ditandatangani tidak melanjutkan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang telah dimulai/berjalan, atau;
 - 2.4. Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** berdasarkan jadwal seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini melebihi 7 (tujuh) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), atau;
 - 2.5. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi atas keterlambatan **Pekerjaan** sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.6. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**.

Paraf Pihak Pertama

					
---	---	---	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

					
---	--	--	--	--	--

3. Dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut/pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi, maka **Pihak Pertama** secara sepihak dapat membatalkan sebagai atau seluruh pengadaan **Material** menurut Perjanjian ini dan **Pihak Pertama** berhak mendapatkan ganti kerugian dari **Pihak Kedua** sebagai akibat peristiwa tersebut.
4. Jika terjadi Pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Pertama** dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan/pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV tersebut.
5. Dalam hal Pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai Material yang telah diterima oleh **Pihak Pertama**. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang disetujui oleh **Para Pihak**.

**PASAL 18
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **Para Pihak** berkaitan dengan **Perjanjian** ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan pada alamat berikut:

a. Pihak Pertama

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340

SCM Division

U.p. : Rini Sekaraji
Telp. : 021-8515521
Faks. : -
Email : scm.division@waskita.co.id

Perwakilan Proyek

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340

U.p. : Paulus Budi Kartiko
Telp. : (021) 851 5521
Faks. : (021) 851 5521
Email : div-gedung@waskita.co.id

b. Pihak Kedua

PT Victorindo Inti Cemerlang

Alamat : Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1 No. 5
Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta Raya 14470

Telp/Fax : 021-22529119 / 021-22529229

Email : info.ptvic@yahoo.com

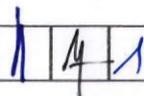
Up : Victor Sunik

2. Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum perubahan tersebut. Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab Pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis tersebut.

**PASAL 19
LAIN - LAIN**

1. **Pihak Kedua** harus melaksanakan semua kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan Perjanjian Utama, oleh karenanya secara hukum **Pihak Kedua** bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



2. Setiap kewajiban **Pihak Pertama** terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewajiban Pihak Kedua terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewajiban **Pihak Pertama**, namun demikian Perjanjian ini bukan merupakan ikatan antara **Pihak Kedua** dengan **Pemilik Proyek**.
3. **Perjanjian** ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
4. Hal-hal lain atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Surat **Perjanjian** ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum yang seluruhnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 20
PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui **Perjanjian** ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dua diantaranya ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk**

**PIHAK KEDUA
PT. VICTORINDO INTI
CERLANG**



Rini Sekaraji
SVP SCM Division

Paulus Budi Kartiko
Pj SVP Building Divison

Victor Sunik
Direktur

Paraf Pihak Pertama

1 | 4 | 1 | 2 |

Paraf Pihak Kedua

□ □ □ □ □

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No : 0201/WSKT/VIC-SEKPRES/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victor Sunik
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT Victorindo Inti Cemerlang
Alamat : Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1No.5 Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
Telpon/Fax : 021 2252 9119 /021 2252 9229
Email : info.ptvic@yahoo.com

Dengan ini menyatakan bahwa apabila kami ditunjuk menjadi rekanan (pemasok, sub kontraktor, mandor borong, pegawai harian) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bersedia melaksanakan semua peraturan / syarat sistem manajemen Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (SMK3LMP) PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta bersedia menerima konsekuensi pemutusan kontrak (hubungan kerja) jika terbukti melanggar ketentuan atau peraturan tentang SMK3LMP yang telah dibuat oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau peraturan hukum yang berlaku di lingkungan kerja setempat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2024

Yang memberi pernyataan,

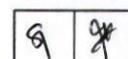


(Victor Sunik)

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua





SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Nomor: 025/SPPM/WK/SCM/WAB/2024

Tanggal: 10 Januari 2024

No Reference PO : 4100052137

Antara

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

Building Division

Dan

PT. VICTORINDO INTI CEMERLANG

Untuk

Pengadaan PLC, SCADA POWER dan PANEL MV

PROYEK DESIGN & BUILD PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

SEKRETARIAT PRESIDEN DAN BANGUNAN PENDUKUNG PADA

KAWASAN ISTANA KEPRESIDENAN DI IBUKOTA NEGARA

(1122037)

SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Antara

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Building Division

Dan

PT. VICTORINDO INTI CEMERLANG

Untuk Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV

Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-01-2024)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. A. Nama : Rini Sekaraji**
Jabatan : Senior Vice President Supply Chain Management Division
- B. Nama : Paulus Budi Kartiko**
Jabatan : Pj Senior Vice President Building Division

Secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam , S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, berkedudukan di Gedung Waskita Heritage, Jalan MT. Haryono Kav. No. 10,Cawang, Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

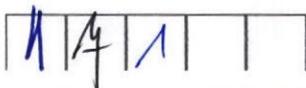
- 2. Nama : Victor Sunik**
Jabatan : Direktur

Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Victorindo Inti Cemerlang, suatu perseroan yang sesuai dengan akta perubahan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 09 Oktober 2023 di buat di hadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0061001.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 09 Oktober 2023, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.Victorindo Inti Cemerlang, berkedudukan Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1 No. 5 Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta Raya 14470 DKI Jakarta disebut "**Pihak Kedua**".

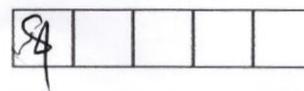
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat untuk Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV untuk keperluan **Pihak Pertama**, yang akan dipergunakan pada Proyek **Pembangunan**

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara dan menyetujui untuk menandatangani bersama, berdasarkan:

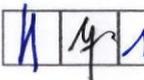
1. Surat Penawaran Pihak Kedua nomor : VQ-12230306 tanggal 27 Desember 2023.
 2. Klarifikasi dan Negosiasi Final Harga Pengadaan tanggal 29 Desember 2023.
 3. Pengumuman Pemenang Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV Nomor : 000089/WK/WeProc/PNM/000398-WAB-2023 tanggal 30 Desember 2023.
 4. Penetapan Pemenang Pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV Nomor : 000089/WK/WeProc/PTP/000398-WAB-2023 tanggal 8 Januari 2024.
- dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 **Perjanjian**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.2 **Perjanjian Utama**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan Pemilik Proyek berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini.
- 1.3 **Pengguna Jasa**, berarti **Pejabat Pembuat Komitmen Bina Penataan Bangunan I Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur** yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik **Proyek**.
- 1.4 **Pekerjaan**, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV, peralatan perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan **Pihak Kedua**.
- 1.5 **Harga Pekerjaan**, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara **Pekerjaan** yang akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 1.6 **Pekerjaan tambah/kurang**, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari **Pekerjaan**, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan **Pekerjaan**, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaan **Pihak Kedua** yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini dan dinyatakan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- 1.7 **Berita Acara Penerimaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV (BAPM)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** yang memuat keterangan bahwa PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dikirim oleh **Pihak Kedua** telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 1.8 **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang memuat perhitungan pengiriman yang telah dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dengan merujuk kepada Persyaratan Teknis.
- 1.9 **Berita Acara Pembayaran (BAP)**, adalah berita acara yang dikeluarkan **Pihak Pertama** yang menyatakan pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dilakukan **Pihak Kedua** telah dapat dilakukan pembayaran karena telah memenuhi Persyaratan Teknis dan syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya.
- 1.10 **Konsultan Pengawas**, berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Utama** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini.
- 1.11 **Serah Terima Pertama**, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV yang dilaksanakan **Pihak Kedua** telah selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Persyaratan Teknis dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 1.12 **Masa Pemeliharaan**, berarti suatu jangka waktu dimana **Pihak Kedua** diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil **Pekerjaan** sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil **Pekerjaan**.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

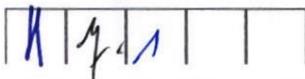
Pihak Pertama bersedia membeli dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** bersedia menjual dengan baik PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dokumen Kontrak Utama, sesuai contoh material yang telah disetujui **Pihak Pertama** dan akan dipergunakan untuk pekerjaan **Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara** dengan perincian kualitas dan prakiraan volume dan harga satuan yang tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini

**PASAL 3
JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI**

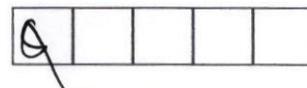
1. Jenis dan kualitas material serta prakiraan volume yang harus diadakan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cubicle 01 - Metering GU	1 unit	90,356,000	90,356,000
2.	Cubicle 02 - Aresster	1 unit	70,032,000	70,032,000
3.	Cubicle 03 - Incoming F1A	1 unit	268,350,000	268,350,000
4.	Cubicle 04 - Incoming GA	1 unit	262,315,000	262,315,000
5.	Cubicle 05 - Outgoing GUT5	1 unit	230,005,000	230,005,000
6.	Cubicle 06 - Outgoing GUT4	1 unit	262,315,000	262,315,000
7.	Cubicle 07 - Outgoing GUT3	1 unit	262,315,000	262,315,000
8.	Cubicle 08 - Bustie GU	1 unit	268,598,000	268,598,000
9.	Cubicle 09 - Incoming GB	1 unit	267,657,000	267,657,000
10.	Cubicle 10 - Outgoing GUT2	1 unit	230,005,000	230,005,000
11.	Cubicle 11 - Outgoing GUT1	1 unit	230,005,000	230,005,000
12.	Cubicle 12 - Kubikal GUG1	1 unit	230,005,000	230,005,000
13.	Cubicle 13 - Kubikal GUG3	1 unit	230,005,000	230,005,000
14.	Cubicle 14 - Incoming F1B	1 unit	264,399,000	264,399,000
15.	Accessories MVMDP SWB GARDU UTAMA	1 unit	8,802,000	8,802,000
16.	Cubicle 15 - Metering	1 unit	106,794,000	106,794,000
17.	Cubicle 16 - Aresster	1 unit	91,812,000	91,812,000

Paraf Pihak Pertama

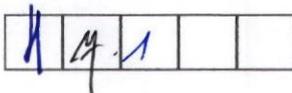


Paraf Pihak Kedua

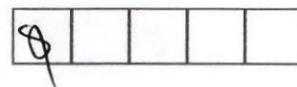


No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
18.	Cubicle 17 - Kubikal G1GU	1 unit	289,751,000	289,751,000
19.	Cubicle 18 - Incoming G1T2	1 unit	290,444,000	290,444,000
20.	Cubicle 19 - Bustie G1	1 unit	341,359,000	341,359,000
21.	Cubicle 20 - Outgoing G1T1	1 unit	240,706,000	240,706,000
22.	Cubicle 21 - Outgoing G1T6	1 unit	240,706,000	240,706,000
23.	Cubicle 22 - Kubikal G1G3	1 unit	291,835,000	291,835,000
24.	Accessories SWB GARDU G1	1 unit	8,802,000	8,802,000
25.	Cubicle 23 - Metering	1 unit	176,188,000	176,188,000
26.	Cubicle 24 - Aresster	1 unit	70,032,000	70,032,000
27.	Cubicle 25 - Incoming F2.2	1 unit	263,008,000	263,008,000
28.	Cubicle 26 - Outgoing G3S1	1 unit	262,315,000	262,315,000
29.	Cubicle 27 - Kubikal G3G1	1 unit	267,657,000	267,657,000
30.	Cubicle 28 - Kubikal G3GA	1 unit	262,315,000	262,315,000
31.	Cubicle 29 - Outgoing G3KP	1 unit	230,005,000	230,005,000
32.	Cubicle 30 - Bustie G3	1 unit	314,309,000	314,309,000
33.	Cubicle 31 - Kubikal G3GU	1 unit	267,657,000	267,657,000
34.	Cubicle 32 - Outgoing G3IN	1 unit	262,315,000	262,315,000
35.	Cubicle 33 - Incoming G3GB	1 unit	262,315,000	262,315,000
36.	Cubicle 34 - Outgoing G3S2	1 unit	230,005,000	230,005,000
37.	Cubicle 35 - Incoming F2.1	1 unit	264,399,000	264,399,000
38.	Accessories SWB GARDU G2	1 unit	8,802,000	8,802,000
39.	Cubicle 44 - Kubikal GA	1 unit	251,965,000	251,965,000
40.	Cubicle 45 - Kubikal G1	1 unit	256,514,000	256,514,000
41.	Cubicle 46 - Kubikal G2	1 unit	251,171,000	251,171,000
42.	Cubicle 47 - Kubikal ZZ	1 unit	251,171,000	251,171,000
43.	Cubicle 48 - Kubikal G3	1 unit	251,171,000	251,171,000

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua

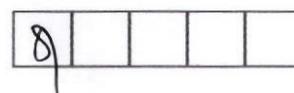


No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
44.	Cubicle 49 - Kubikal G4	1 unit	251,171,000	251,171,000
45.	Cubicle 50 - Kubikal GB	1 unit	251,171,000	251,171,000
46.	Accessories SWB GARDU G2	1 unit	8,802,000	8,802,000
47.	Cubicle 36 - Kubikal UA	1 unit	284,831,000	284,831,000
48.	Cubicle 37 - Kubikal UB	1 unit	240,336,000	240,336,000
49.	Cubicle 38 - Kubikal UC	1 unit	234,994,000	234,994,000
50.	Accessories	2 Ls	8,802,000	17,604,000
51.	Cubicle 39 - Kubikal UD	1 unit	286,122,000	286,122,000
52.	Cubicle 40 - Kubikal UE	1 unit	284,831,000	284,831,000
53.	Cubicle 41 - Kubikal UF	1 unit	240,336,000	240,336,000
54.	Cubicle 42 - Kubikal UG	1 unit	234,994,000	234,994,000
55.	Cubicle 43 - Kubikal UH	1 unit	286,122,000	286,122,000
56.	PLC System GU	1 lot	2,405,158,000	2,405,158,000
57.	Panel & Accessories GU	1 lot	299,500,000	299,500,000
58.	Workstation GU	1 lot	1,806,722,000	1,806,722,000
59.	PLC System G1	1 lot	1,139,329,000	1,139,329,000
60.	Panel & Accessories G1	1 lot	951,372,000	951,372,000
61.	PLC System G3	1 lot	1,416,816,000	1,416,816,000
62.	Panel & Accessories G3	1 lot	951,372,000	951,372,000
63.	IOT Broker Configuration	1 lot	5,999,000	5,999,000
64.	Envision IOT Adjustmaent	1 lot	37,846,000	37,846,000
65.	Envision Desk adjustment	1 lot	28,135,000	28,135,000
66.	Recommendation system	1 lot	35,347,000	35,347,000
67.	SMART INDIVIDUAL CONTROL UNIT	6 lot	394,748,000	2,368,488,000
68.	POWER SYNC GARDU UTAMA	1 lot	1,878,930,000	1,878,930,000
69.	POWER SYNC GARDU G1	1 lot	586,462,000	586,462,000

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



No	Uraian Material	Volume	Harsat (Rp)	Jumlah (Rp)
70.	POWER SYNC GARDU G3	1 lot	1,171,523,000	1,171,523,000
SUB TOTAL				27.185.000.000
PPN (11%)				2.990.350.000
TOTAL				30.175.350.000

Terbilang : "Tiga Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah"

- Harga satuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat Fixed Unit Price, harga Franco Site Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Pihak Pertama sampai dengan volume kebutuhan terpenuhi seluruhnya.
- Jenis dan kualitas material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**.
- Harga satuan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** sudah termasuk didalamnya biaya, pengetesan dan pajak-pajak yang berlaku.
- Nilai Jual Beli tersebut di atas bersifat prakiraan. Nilai Jual Beli yang sebenarnya adalah realisasi pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, sesuai dengan permintaan dan yang diterima oleh **Pihak Pertama** sesuai harga satuan yang tersebut dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.

**PASAL 4
SPESIFIKASI DAN KUALITAS**

- Pihak Kedua** wajib dan dianggap sudah mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam **Perjanjian Utama** (Spesifikasi Teknis), termasuk ketentuan tentang masa pemeliharaan khususnya yang berkaitan dengan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**. **Pihak Pertama** (apabila diminta **Pihak Kedua**) akan memberi kepada **Pihak Kedua** copy dari Spesifikasi Teknis PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV atas biaya **Pihak Kedua**.
- PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 **Perjanjian** ini harus dalam keadaan baru, memenuhi standar mutu/spesifikasi teknis yang dapat diterima **Pihak Pertama** dan **Konsultan Pengawas**.
- Untuk menjamin kesesuaian kualitas **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, maka sebelum **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dikirim ke lapangan, **Pihak Kedua** diwajibkan untuk melaksanakan test sebagaimana dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis atas beban biaya **Pihak Kedua**.
- Penanganan mutu secara kontinyu dimulai pada saat proses produksi sampai dengan pengiriman.
- PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan diafkir/ditolak dan **Pihak Kedua** wajib mengganti material tersebut atas biaya **Pihak Kedua** dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
- Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mutu material PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV, apabila terjadi ketidaksesuaian mutu, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- Pihak Kedua** wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di bawah paling lambat pada saat penagihan terakhir:
 - Buku Petunjuk Penggunaan dan Perawatan Peralatan.
 - Buku Petunjuk Penggunaan dan Perawatan Sistem Kendali,
 - Sertifikat of Originality dari Pabrikan,
 - Berita Acara Test Com,
 - Surat Jaminan Purna Jual

Paraf Pihak Pertama

1 4 1

Paraf Pihak Kedua

8

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL

1. Pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengikuti jadwal induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya **Perjanjian** ini sampai dengan tanggal **21 Oktober 2024** dan pada tanggal tersebut seluruh **Material** harus sudah diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dan disetujui oleh **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa**.
2. Pengiriman **Material** onsite Proyek Mei 2024.
3. **Pihak Kedua** harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan **Material** sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan sampai dengan kebutuhan lapangan terpenuhi seluruhnya.

PASAL 6

SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

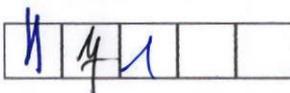
1. Pembayaran Uang Muka 15% (lima belas persen) dari Nilai Jual Beli dibayarkan oleh **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan jaminan uang muka berupa Bank Garansi Uang Muka kepada **Pihak Pertama** yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang di setujui oleh **Pihak Pertama** yang mana berlaku Bank Garansi tersebut wajib diperbaharui oleh **Pihak Kedua** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Bilamana **Pihak Kedua** lalai menerbitkan / memperbarui Bank Garansi tersebut maka **Pihak Pertama** akan menunda pembayaran (hak **Pihak Kedua**) sampai dengan diperbaharunya Bank Garansi tersebut.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progress, Uang Muka 15% (lima belas persen), sebelum pengiriman (dengan melampirkan BA Hasil Uji) 50% (lima puluh persen), Material Onsite MOS 50% (lima puluh lima persen), dengan melampirkan **Berita Acara penerimaan Material (BAPM), Berita Acara Pembayaran (BAP)** dipotong uang muka proposional sesuai progress yang diterbitkan.
3. Setiap tahapan pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan sistem dengan skema Reguler sesuai dengan Prosedur Keuangan Pihak Pertama.
4. Pembayaran reguler 45 hari.
5. Kuitansi diterima **Pihak Pertama** dengan dilengkapi lampiran-lampirannya secara lengkap dan benar sesuai ketentuan akuntansi, sebagai berikut:
 - a. Asli Kwitansi
 - b. Copy Faktur Pajak
 - c. Berita Acara Penerimaan Material (BAPM) dan Dokumentasi
 - d. Berita Acara Pembayaran
 - e. Surat jalan asli;
 - f. Surat Penyaluran Rekening Pembayaran;
 - g. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada);
 - h. E-Nofa;
 - i. KTP Direksi;
 - j. NPWP dan SPPKP perusahaan;
 - k. NIB;
 - l. Dokumentasi material dan dokumentasi pengiriman material
6. **Pihak Pertama** berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh **Pihak Kedua**, apabila:
 - 6.1. Kualitas atau kuantitas Material yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui **Pihak Pertama** dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;
 - 6.2. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** sebagai akibat kelalaian/ kegagalan **Pihak Kedua**, atau;
 - 6.3. Timbul perselisihan antara **Para Pihak** atau **Pihak Pertama** dengan **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa**, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.

PASAL 7

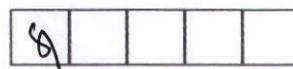
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
JAMINAN PENGADAAN MATERIAL

1. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut Surat **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Jaminan Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank atau Asuransi yang disetujui **Pihak Pertama** sebesar 5% dari nilai jual beli.
2. Jaminan Pengadaan tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dikembalikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah pengiriman **Material** ke lapangan terpenuhi seluruhnya yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila:
 - 3.1. **Pihak Kedua** menarik/mengundurkan diri atau tidak sanggup dan menyerahkan sebagian atau seluruh pengiriman Material kepada pihak lain, atau;
 - 3.2. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan pengiriman **Material**, atau;
 - 3.3. **Pihak Kedua** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini tetap tidak melaksanakan pengiriman, atau;
 - 3.4. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - 3.5. Terjadi pemutusan **Perjanjian** antara **Para Pihak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 **Perjanjian** ini.

PASAL 9
KLAIM KENAIKAN HARGA

Pada dasarnya **Pihak Kedua** tidak dibenarkan menuntut/klaim biaya tambahan kenaikan harga, sampai dengan kebutuhan dilapangan sesuai **Perjanjian** ini terpenuhi seluruhnya.

PASAL 10
PEMERIKSAAN MUTU

1. Inspeksi **Material** akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** bersama **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** atas dasar spesifikasi tersebut di atas. Pemeriksaan **Material** tersebut akan dilakukan sebelum **Material** dikirim dan harus disaksikan oleh **Para Pihak**.
2. Dalam hal khusus atas permintaan **Konsultan MK** dan **Pengguna Jasa** menghendaki pemeriksaan ditempat lain atau instansi yang ditunjuk, **Pihak Kedua** wajib memenuhi persyaratan tersebut dengan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 11
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila terjadi penyimpangan kualitas/mutu dari yang disyaratkan dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini yang menyebabkan pekerjaan dibongkar akibat dari **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang dikirim, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang dibongkar tersebut dan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan mutu tersebut menjadi beban **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut sebagian atau keseluruhan sebagaimana syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini maupun jadwal yang telah ditentukan dan bilamana **Pihak Pertama** dengan terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya yang mungkin timbul menjadi beban **Pihak Kedua**, dengan pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila **Pihak Pertama** pada suatu waktu berkeyakinan bahwa **Pihak Kedua** karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan **Pihak Pertama** karena kurang/tidak mampu bekerja atau gagal melaksanakan tugasnya atau berbuat/melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan **Pihak Pertama** atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak, **Pihak Kedua** belum juga memulai kegiatannya, didahului peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, maka **Pihak Pertama** secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan/membatalkan **Perjanjian** ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.

Paraf Pihak Pertama

				
---	---	---	--	--

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap keadaan memaksa/force majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **Pihak Kedua** maupun **Pihak Pertama** seperti bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara umum, pemogokan yang bersifat memaksa dan berakibat langsung terhadap pengadaan Material dan jangka waktu pengadaan, yang disetujui secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, **Pihak Pertama** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam jangka waktu 7 x 24 jam, sejak pemberitahuan tersebut diterima atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pada dasarnya **Pihak Pertama** hanya mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV atas terjadinya keadaan memaksa/force majeure.

PASAL 13
RISIKO

1. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **Pihak Kedua**, maka segala resiko akibat kemacetan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** selama melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dalam pelaksanaan atau pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV ini), maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh **Konsultan MK** atau **Pengguna Jasa**, maka selambat-lambatnya 1 x24jam, **Pihak Kedua** harus dengan segera mengeluarkan dari lapangan dan mengganti kembali sejumlah yang ditolak dengan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

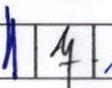
PASAL 14
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Apabila selama jangka waktu pengadaan terjadi perubahan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tambah atau kurang, apabila pekerjaan tambah tersebut melebihi dari Nilai Jual Beli maka akan dituangkan kedalam Addendum Perjanjian dengan mengacu harga satuan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang dianggap sah setelah mendapat perintah dan persetujuan **Pihak Pertama** secara tertulis.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dilakukan atas dasar harga yang tercantum pada Pasal 3 **Perjanjian** ini, namun apabila harga satuan dimaksud tidak ditentukan daftar harga satuan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** dalam **Perjanjian** ini, maka harga satuan akan ditentukan kemudian.
4. Adanya pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah jangka waktu pengadaan **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 15
PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Perjanjian ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran **Perjanjian** ini.

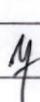
PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan atau timbul karena **Perjanjian** ini baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir, dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dalam waktu **14 (empat belas) hari** tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** tidak akan menggugat ke pengadilan (termasuk pengadilan niaga) kepada **Pihak Pertama, Para Pihak** akan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT. 4 RW. 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 dan bukan melalui pengadilan/pengadilan niaga.
3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.
4. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka **Pihak Kedua** tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** yang mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama** sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-19/MBU/2013 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.
2. **Pihak Pertama** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, apabila :
 - 2.1. **Pihak Kedua** telah memindah-tangankan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** kepada pihak ketiga, atau;
 - 2.2. Terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhinya dan atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak **Perjanjian** ditandatangani tidak melanjutkan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** yang telah dimulai/berjalan, atau;
 - 2.4. Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV** berdasarkan jadwal seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini melebihi 7 (tujuh) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), atau;
 - 2.5. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi atas keterlambatan **Pekerjaan** sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.6. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV**.

Paraf Pihak Pertama

					
---	---	---	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

					
--	--	--	--	--	--

3. Dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut/pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi, maka **Pihak Pertama** secara sepihak dapat membatalkan sebagai atau seluruh pengadaan **Material** menurut Perjanjian ini dan **Pihak Pertama** berhak mendapatkan ganti kerugian dari **Pihak Kedua** sebagai akibat peristiwa tersebut.
4. Jika terjadi Pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Pertama** dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan/pengiriman PLC, SCADA POWER DAN PANEL MV tersebut.
5. Dalam hal Pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai Material yang telah diterima oleh **Pihak Pertama**. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang disetujui oleh **Para Pihak**.

PASAL 18 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang ditujukan kepada **Para Pihak** berkaitan dengan **Perjanjian** ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan pada alamat berikut:

a. Pihak Pertama

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340

SCM Division

U.p. : Rini Sekaraji
Telp. : 021-8515521
Faks. : -
Email : scm.division@waskita.co.id

Perwakilan Proyek

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340

U.p. : Paulus Budi Kartiko
Telp. : (021) 851 5521
Faks. : (021) 851 5521
Email : div-gedung@waskita.co.id

b. Pihak Kedua

PT Victorindo Inti Cemerlang

Alamat : Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1 No. 5
Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta Raya 14470

Telp/Fax : 021-22529119 / 021-22529229

Email : info.ptvic@yahoo.com

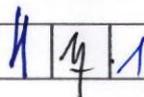
Up : Victor Sunik

2. Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum perubahan tersebut. Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab Pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis tersebut.

PASAL 19 LAIN - LAIN

1. **Pihak Kedua** harus melaksanakan semua kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan Perjanjian Utama, oleh karenanya secara hukum **Pihak Kedua** bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



2. Setiap kewajiban **Pihak Pertama** terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewajiban Pihak Kedua terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi kewajiban **Pihak Pertama**, namun demikian Perjanjian ini bukan merupakan ikatan antara **Pihak Kedua** dengan **Pemilik Proyek**.
3. **Perjanjian** ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
4. Hal-hal lain atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Surat **Perjanjian** ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum yang seluruhnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 20
PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui **Perjanjian** ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dua diantaranya ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk**

**PIHAK KEDUA
PT. VICTORINDO INTI
CEMERLANG**



Rini Sekaraji
SVP SCM Division

Paulus Budi Kartiko
Pj SVP Building Divison



Victor Sunik
Direktur

Paraf Pihak Pertama

1 | 4 | 1 | 2

Paraf Pihak Kedua

□ □ □ □ □

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No : 0201/WSKT/VIC-SEKPRES/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victor Sunik
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT Victorindo Inti Cemerlang
Alamat : Jl. Kamal Muara VII Sentra Industri Terpadu Tahap 3 Blok A1No.5 Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
Telpon/Fax : 021 2252 9119 /021 2252 9229
Email : info.ptvic@yahoo.com

Dengan ini menyatakan bahwa apabila kami ditunjuk menjadi rekanan (pemasok, sub kontraktor, mandor borong, pegawai harian) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bersedia melaksanakan semua peraturan / syarat sistem manajemen Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (SMK3LMP) PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta bersedia menerima konsekuensi pemutusan kontrak (hubungan kerja) jika terbukti melanggar ketentuan atau peraturan tentang SMK3LMP yang telah dibuat oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau peraturan hukum yang berlaku di lingkungan kerja setempat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2024

Yang memberi pernyataan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
42BCAAKX773710177
PT VICTORINDO INTI CEMERLANG
(Victor Sunik)

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua